

SOSIOLOGI ELIT POLITIK SUMSEL



Alamsyah

Dosen Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Sriwijaya

Salah satu kajian menarik dalam kajian politik lokal adalah soal sosiologi elit politik lokal. Topik ini berusaha menjelaskan latar belakang sosiologis para elit politik lokal. Secara teoritik, latar belakang sosiologis elit politik lokal akan mempengaruhi gaya mereka untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan mereka. Artikel ini mencoba mengelaborasi topik ini berdasarkan fakta empiris yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Siapa mereka?

Dalam tulisan ini, elit politik lokal didefinisikan sebagai individu yang memiliki kekuasaan formal di lembaga politik. Mengikuti skema David Easton, lembaga politik itu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, kelompok kepentingan, media massa, dan partai politik. Setiap individu di Sumatera Selatan yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi di lembaga-lembaga politik ini bisa dikategorikan sebagai elit politik lokal. Dalam artikel ini, penulis akan fokus ke elit politik lokal di lembaga eksekutif, khususnya calon kandidat Pilgub Sumsel 2013, yakni: Ir. H. Alex Nurdin, H. Ridwan Mukti, SH, MH, Ir. H. Ishak Mekki, Ir. H. Edy Santana Putra, MT dan H. Herman Deru, SH, MM.

Pendidikan

Mayoritas calon kandidat Pilgub Sumsel 2013 berlatar belakang pendidikan sarjana (S1). Dari lima kandidat, tiga orang berasal dari ilmu teknik (Alex Nurdin, Ishak Mekki, dan Edy Santana Putra), satu orang berpendidikan ilmu ekonomi (Ridwan Mukti), dan satu lagi berpendidikan ilmu hukum (Herman Deru). Dari lima kandidat, empat diantaranya berpendidikan magister (S2), yakni Ridwan Mukti, Ishak Mekki, Edy Santana Putra, dan Herman Deru dan hanya satu orang kandidat (Ridwan Mukti) yang sedang menempuh pendidikan doktor (S3).

Latar belakang pendidikan calon gubernur menunjukkan bagaimana komitmen pribadi mereka terhadap peningkatan kapasitas intelektual individual dan dunia pendidikan. Sangat lucu jika seorang kandidat mengkampanyekan pentingnya pendidikan sementara yang bersangkutan sendiri tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Normanya, pemimpin itu harus memberikan suri tauladan yang baik.

Di masyarakat Sumatera Selatan, pendidikan merupakan sumber status sosial. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuhnya, semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan jalur alternatif mobilitas sosial vertikal. Dalam bahasa masyarakat awam, pendidikan dapat merubah nasib seseorang menjadi lebih baik. Keyakinan ini semakin tebal ketika masyarakat mengalami sendiri betapa tidak mudah mengirim anak mereka ke perguruan tinggi negeri yang ada di daerah mereka. Pada titik ini, jenjang pendidikan dan asal perguruan tinggi kandidat akan menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan pemilih Pilgub Sumsel 2013.

Fakta di atas juga menunjukkan bagaimana orang-orang eksakta “mendominasi” orang-orang non-eksakta. Dari lima kandidat, tiga diantaranya berpendidikan teknik. Apakah kebiasaan mereka menggunakan logika matematika menyebabkan mereka lebih piawai untuk menyederhanakan

fenomena politik yang kompleks menjadi bagan sederhana yang mudah dicerna? Apakah orang non-eksakta terlalu “bingung” akibat pengaruh beragam perspektif teoritis yang ada di kepala mereka sehingga fenomena politik yang kompleks bertambah semakin kompleks? Jika disederhanakan, maka kedua pertanyaan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: bagi orang eksakta, $1+1 = 2$, bagi orang non-eksakta, $1+1 = 11$.

Pekerjaan

Ada tiga mantan birokrat di Dinas Pekerjaan Umum yang terjun ke dunia politik sebagai kepala daerah, yakni Alex Nurdin, Ishak Mekki, dan Edy Santana Putra. Satu orang lagi, yakni Ridwan Mukti, berasal dari politisi Senayan dengan latar belakang profesional. Satunya lagi, Herman Deru, berprofesi sebagai pengusaha yang terjun ke politik, meski sebelumnya pernah merasakan status sebagai pegawai negeri sipil.

Mengapa mantan birokrat yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum mendominasi? Jawabannya sederhana: di zaman Orde Baru, ketika otonomi daerah dijalankan dengan setengah hati, Dinas Pekerjaan Umum merupakan satu-satunya satuan kerja perangkat daerah yang mengelola dana pembangunan besar. Di zaman itu, perilaku *rent seeking* mewabah dikalangan birokrat. Ketidakpedulian rezim Orde Baru terhadap kasus korupsi menyebabkan birokrat yang mengelola dana besar lebih leluasa untuk mempraktekkan perilaku *rent seeking* mereka. Apakah ketiga kandidat gubernur yang berlatar birokrat Dinas Pekerjaan Umum ini termasuk dalam kategori *rent seeker*? Hanya Allah SWT yang bisa menjawabnya. Faktanya, mereka pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang mengelola sektor infrastruktur yang dianak-emaskan rezim Orde Baru.

Mengapa rezim Orde Baru menganak-emaskan sektor infrastruktur? Sebab, rezim Orde Baru adalah penganut aliran Keynesian yang menekankan investasi riil. Di mata rezim Orde Baru, investasi riil itu diterjemahkan menjadi proyek-proyek infrastruktur fisik yang efek berantainya sangat jelas. Tentu saja, fakta objektif rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik di Indonesia juga mendorong investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.

Mengapa politisi Senayan turun gunung? Mengapa pengusaha terjun ke politik? Motivasinya bisa macam-macam, dari yang paling idealis sampai ke yang pragmatis. Setali tiga uang dengan birokrat, para politisi dan pengusaha di zaman Orde Baru biasanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan politik. Banyak pengusaha lokal tumbuh dan berkembang karena asupan gizi dari pemerintah. Sementara itu, pasca Pemilu 1999, Senayan banyak diisi wajah baru hasil kaderisasi rezim Orde Baru.

Melalui uraian ini saya ingin menunjukkan bahwa (a) di Sumatera Selatan belum terjadi transisi kepemimpinan politik. Kelima kandidat Gubernur Sumatera Selatan yang disebutkan di atas merupakan wajah-wajah lama yang memiliki kaitan sejarah dengan rezim Orde Baru; (b) birokrasi merupakan salah satu produsen pemimpin politik yang lebih teruji ketimbang partai politik.

Pengalaman organisasi

Di lihat dari orientasi aktivitasnya, organisasi itu ada tiga jenis, yakni: organisasi pemerintah yang fokus ke pelayanan publik, organisasi swasta yang *profit oriented*, dan organisasi kemasyarakatan yang *non-profit* dan *self-service*.

Dilihat profil mereka, semua kandidat Gubernur Sumatera Selatan memiliki rekam jejak yang panjang dalam organisasi. Edy Santana Putra, sebagai contoh, pernah dan/atau sedang aktif di organisasi kepemudaan (FKKPI, KNPI), organisasi profesi (PII, AHTHI), organisasi olahraga (PERBAKIN, PORTELA SRIWIJAYA), organisasi kemasyarakatan (IKATS UNSRI) pada level lokal. ESP juga memiliki jaringan nasional (APEKSI, CityNet) (lihat, <http://humasprotokol.palembang.go.id>). Alex Nurdin aktif di organisasi kepemudaan (PPM) dan organisasi olahraga (INKAI, POSSI, PRSI, PABSI) (<http://www.alexnoerdin.info>).

Sedangkan Ishak Mekki pernah dan/atau sedang aktif di organisasi kepemudaan (KNPI), organisasi olahraga (IPSI, PSASI), organisasi pendidikan (UNISKI) (<http://ishakmekki.com>).

Ridwan Mukti juga pernah dan/atau sedang aktif di organisasi kepemudaan (AMPG, AMPI, KNPI), organisasi olahraga (PSSI), organisasi kemasyarakatan (KADIN, ICMI) (<http://ridwanmukti.com>). Pun demikian dengan Herman Deru yang pernah dan/atau sedang aktif di organisasi pelajar (OSIS), organisasi kepemudaan (GM KOSGORO, KNPI), organisasi keagamaan (NU), organisasi kependidikan (STIE Trisna Negara), organisasi olahraga (Futsal, Taekwondo, Lemkari) (<http://www.humas.okutimurkab.go.id>).

Fakta ini bisa ditafsirkan sebagai berikut: (a) elit-elit politik di Sumatera Selatan tidak lahir secara instan. Mereka melalui proses panjang yang penuh suka dan duka; (b) elit-elit politik cenderung membentuk sel-sel politik. Sel-sel ini merupakan salah satu pintu masuk para elit politik untuk mendekati beragam komunitas di tengah masyarakat Sumatera Selatan yang heterogen. Semakin banyak sel politik dan semakin banyak pintu masuk, maka semakin luas jangkauan para elit politik untuk membangun basis-basis massa di tengah masyarakat; (c) beragam organisasi ini juga memproduksi peran dan status sosial baru. Semakin banyak peran dan status sosial yang dimiliki para elit politik, maka semakin banyak cara atau langkah untuk memproduksi popularitas para elit politik di mata masyarakat.

Agama

Semua elit politik di atas memiliki gelar haji. Hal ini mengindikasikan bahwa semuanya beragama Islam. Dalam masyarakat Sumatera Selatan yang mayoritas beragama Islam, simbol haji tetap memainkan peran penting. Gelar haji tidak hanya menunjukkan komitmen keislaman seseorang, tetapi ia memiliki imbas dalam kehidupan sosial. Umumnya, masyarakat Sumatera Selatan menganggap bahwa orang yang berhaji merupakan panutan masyarakat. Anggapan seperti ini muncul karena pergi haji itu tidak semudah membalik telapak tangan. Selain mensyaratkan kemampuan ekonomi dan fisik, juga ada faktor “dipanggil Allah”. Ketika seorang elit politik memiliki gelar haji, ia akan memiliki citra positif beberapa derajat lebih tinggi daripada elit politik yang belum berhaji.

Etnisitas

Seluruh kandidat Pilgub Sumsel 2013 memiliki latar etnis yang berbeda. Alex Nurdin dan Ridwan Mukti merepresentasikan orang Musi. Edy Santana Putra mewakili Ogan Ilir. Ishak Mekki berasal dari etnis Kayu Agung yang secara kultural berbatasan dengan kultur Komering Ilir. Herman Deru mewakili etnis Komering Ulu. Dalam politik lokal dan nasional, sentimen etnis ini selalu tak bisa dihindari. Ia sesuatu yang *given*.

Karenanya, dalam kasus Sumatera Selatan, koalisi politik mengindikasikan adanya koalisi etnis. Ketika koalisi partai politik seringkali mandul dalam mendorong elektabilitas dan popularitas para kandidat, koalisi etnis menjadi salah satu alternatif bagi para kandidat untuk menerobos kebekuan kompetensi para pemilih dalam mengunyah dan menelan program-program politik yang dibungkus dengan bahasa-bahasa ilmiah.

Memang, etnisitas tidak selalu menjadi faktor penentu pilihan akhir politik para pemilih. Etnisitas itu sangat cair dan tidak bisa diabaikan. Tetapi, fakta objektifnya adalah etnisitas itu tetap terpelihara dan hidup dalam masyarakat Sumatera Selatan sebagaimana disimbolkan dalam slogan *wong kito galo, jeme kite, urang diri, hang dikhi, jelma dija, wang kite, dan wang tobo*. Slogan-slogan ini menunjukkan bagaimana etnisitas menjadi pintu masuk proses identifikasi sosial yang membedakan “*kita*” dan “*mereka*”. Seberapa jauh pemilahan sosial ini berimbas kepada pemilahan pilihan politik sangat dipengaruhi kepiawaian para kandidat untuk mempengaruhi variabel-variabel yang secara nyata terbukti mempengaruhi perilaku pemilih pilkada. Semoga bermanfaat!